



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Kepala BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 18 Januari 2022.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021; 2. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022; 3. Isu-Isu Aktual terkait Perkembangan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Penyampaian Aspirasi Masa Reses
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BNPB beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi oleh Wakil Ketua Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si Dan Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Isu-Isu Aktual terkait perkembangan RUU PB dan Penyampaian Aspirasi Masa Reses**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran BNPB tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 7.158.144.690.864,-** (*Tujuh Triliun Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) atau sekitar **99,08%** dari Total Anggaran sebesar **Rp.7.224.673.394.000,-** (*Tujuh Triliun Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Ketahanan Bencana	Rp. 6.955.393.677.000,-	Rp. 6.897.772.423.562,-	99,17
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 269.279.717.000,-	Rp. 260.732.267.302,-	96,69
Jumlah Realiasi Anggaran		Rp.7.224.673.394.000,-	Rp. 7.158.144.690.864,-	99,08

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan secara rinci mengenai penggunaan APBN tahun anggaran 2021 bersama Eselon I dalam Rapat Dengar Pendapat.

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran BNPB Tahun 2022 sebesar Rp **Rp1.127.245.196.000,-** (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Program Ketahanan Bencana sebesar Rp.838.234.849.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) termasuk Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp.250.000.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar*) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.289.010.347.000.- (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI dan Kepala BNPB sepakat untuk menetapkan Asrama Haji sebagai tempat Karantina Terpusat bagi Jamaah Umrah yang baru pulang dari Arab Saudi.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meminta kepala BNPB untuk memperhatikan dan merespon usulan daerah terdampak bencana dari hasil Kunjungan maupun penyerapan Aspirasi Komisi VIII DPR RI seperti: Kabupaten Maros, Empat Lawang, Banyuasin, Padang Lawas, Lampung Tengah dan daerah lainnya.
 - b. Meningkatkan literasi, dan mitigasi bencana pada program Desa Tangguh Bencana untuk menambah jumlah desa dan alokasi anggarannya guna meminimalisir korban terdampak bencana.

- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB termasuk penetapan kriteria prioritas daerah penerima bantuan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dalam program sosialisasi kepada masyarakat tentang sadar bencana khususnya di daerah rawan bencana termasuk di daerah pemilihan.
5. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi respon dan gerak cepat BNPB dalam program relokasi Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di lahan 81 Ha untuk korban Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dan Bantuan DSP Gempa Tektonik Banten yang telah di salurkan tahap awal ke Kabupaten Pandeglang.
 6. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk berkomunikasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait guna percepatan proses finalisasi pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, SPt.